

## KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia

Tanggal : 22 Januari 2011

Subyek : Longsor

Hal : 8

### Longsor, Jalur NTT-Timor Leste Terputus

RUAS jalan yang menghubungkan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste terputus di Kampung Bere Muri, Desa Na-naet, Kecamatan Nanaet Dua-besi, Kabupaten Belu, akibat longsor.

Ruas jalan itu putus sejak awal pekan ini, namun belum diperbaiki akibat hujan yang masih mengguyur wilayah tersebut.

Seorang warga Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Edy Hauni yang dihubungi Media Indonesia mengatakan kendaraan dari Timor Leste maupun dari Kupang dan Belu yang ingin menyeberang garis perbatasan tertahan di ujung longsor.

Di antara kendaraan tersebut k-rd.ip.it kendaraan pengangkut balian kebutuhan pokok dan kendaraan penumpang. Panjang longsor sekitar 10 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter.

Longsor juga mengakibatkan tiga desa yang berada persis di sepanjang garis perbatasan terisolasi, yakni Desa Nanano, Fahoeka, dan sebagian wilayah Desa Nanaet.

Edi mengatakan warga mulai membuka jalan alternatif untuk melewati lokasi longsor. Karena itu, kemarin pagi, kendaraan roda dua sudah bisa melintas. Namun, kendaraan roda empat masih tertahan di kedua ujung longsor.

Wakil Bupati Belu Ludovikus Taolin mengatakan pihaknya segera mengerahkan peralatan berat untuk memperbaiki badan jalan yang terkena longsor tersebut. Akan tetapi, menurut Ludovikus, perbaikan jalan membutuhkan waktu lama karena kondisi tanah di wilayah itu sangat labil.

Kerusakan jalan juga terjadi di wilayah Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Hal itu berdampak pada kerugian pengusaha angkutan.

Pengurus Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda)

Banyumas Sutanta mengatakan kerusakan jalan di sejumlah wilayah di Jateng selatan membuat pra pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perbaikan armada mereka.

Jalan yang rusak menyebabkan ban cepat aus dan suku cadang cepat rusak. "Padahal, untuk ban saja harganya saat ini cukup tinggi. Contohnya ban truk, harganya mencapai Rp1.65 juta dari sebelumnya Rp700 ribu per ban," jelasnya, kemarin.

Karena itu, Sutanta mengimbau pemerintah daerah maupun pusat memberi perhatian terkait masalah tersebut. (PO/LD/N-1)